

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-21/BC/2024

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) KESEPAKATAN PENGAKUAN
TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*MUTUAL
RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*)
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN *THE CUSTOMS
AND EXCISE DEPARTMENT OF THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA*

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) telah ditandatangani Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *The Customs and Excise Department of The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People's Republic of China*;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditandatangani *Notes of Meeting* antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *The Customs and Excise Department of The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People's Republic of China*;
 - c. bahwa telah dilakukan uji coba pelaksanaan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *The Customs and Excise Department of The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People's Republic of China*;
 - d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud dalam huruf c, kedua belah pihak bersepakat untuk menerapkan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat secara penuh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penerapan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *The Customs and Excise Department of The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People's Republic of China*, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Kesepakatan

Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *The Customs and Excise Department of The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People's Republic of China*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 987);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN *THE CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT OF THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA*.

KESATU : Menerapkan secara penuh klausul-klausul yang tercantum dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator*) dan *Notes of Meeting* antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan *The Customs and Excise Department of The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People's Republic of China* (HK C&ED) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I huruf A dan Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Penerapan klausul-klausul dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat dan *Notes of Meeting* antara DJBC dengan HK C&ED sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, khususnya mengenai pemberian fasilitas perdagangan melalui percepatan proses *customs clearance* berupa penurunan tingkat risiko sebesar 20% pada *risk engine* reguler dalam manajemen risiko penjaluran impor.

KETIGA : Fasilitas perdagangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan dengan ketentuan:

- barang impor berasal dari pelabuhan muat di Hong Kong;
- menggunakan kode fasilitas 451 dengan mencantumkan nomor identifikasi AEO (*AEO Trader Identification Number*) dan tanggal otorisasi (*authorization date*) perusahaan AEO Hong Kong; dan

c. merupakan barang impor untuk dipakai dengan pemberitahuan pabeannya menggunakan Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0.

KEEMPAT : Memerintahkan Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Teknis Kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sehubungan dengan penerapan secara penuh (*mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2024

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

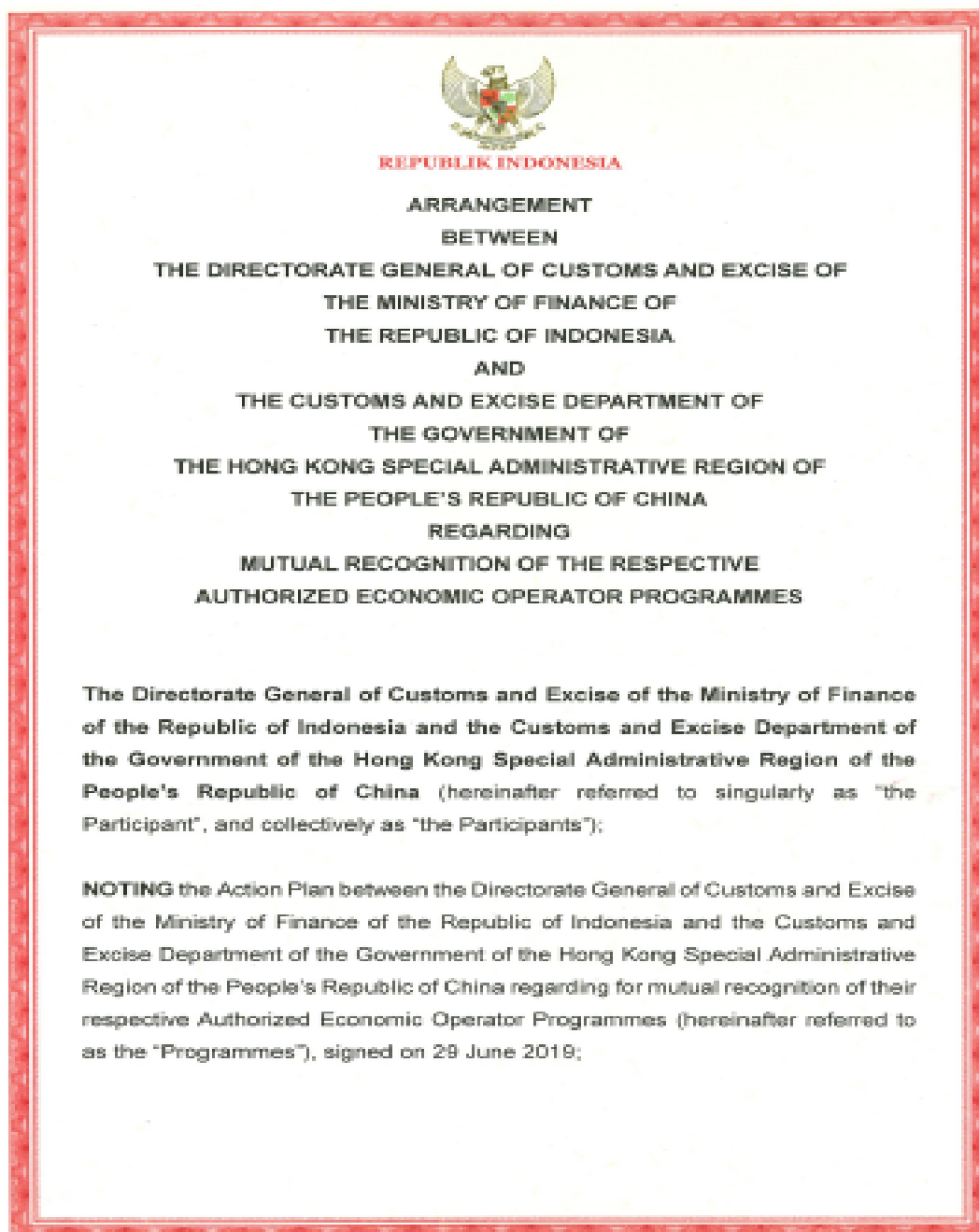


Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR KEP-21/BC/2024
TENTANG
PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*)
KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK
OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*MUTUAL
RECOGNITION ARRANGEMENT AUTHORIZED
ECONOMIC OPERATOR*) ANTARA DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN *THE
CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT OF THE
GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL
ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA*

- A. KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN *THE CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT OF THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA*.



CONSIDERING that a joint evaluation by the Participants has confirmed that their respective Programmes are security and compliance initiatives that strengthen the security of the supply chain;

RECOGNIZING that the Programmes apply security requirements in accordance with the respective laws of the Participants as well as the internationally recognized security standards set forth in the "SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade" (hereinafter referred to as the "SAFE Framework") adopted by the World Customs Organization (hereinafter referred to as the "WCO");

ACKNOWLEDGING the specialized nature of the management processes, procedures, mechanisms and the legislations adopted by the Participants in administering their respective Programmes;

UNDERSTANDING that the Programmes and other Customs-to-Customs measures between the Participants not only contribute significantly to end-to-end supply chain security but also facilitate legitimate trade;

TAKING INTO ACCOUNT Co-operative Arrangement between the Participants regarding Co-operation and Mutual Administrative Assistance in Customs Matters signed in Hong Kong on 16th February 2017;

HAVE REACHED THE FOLLOWING ARRANGEMENTS:

Article 1

Responsible Entities and Scope

- 1.1. The Participants will be the responsible entities for the implementation of this Arrangement.
- 1.2. This Arrangement exclusively concerns the recognition of the respective Programmes administered by the Participants.

Article 2
Compatibility

The Participants will ensure that:

- (a) the standards applied to the respective Programmes remain compatible in the following aspects:
 - i) accreditation criteria;
 - ii) application process;
 - iii) validation process;
 - iv) approval process; and
 - v) monitoring and evaluation process.

- (b) their respective Programmes will continue to operate in accordance with the principles and standards of the SAFE Framework.

Article 3
Mutual Recognition

- 3.1. Each Participant will accept the validation result and approval status granted to Authorized Economic Operators (hereinafter referred to as "AEOs") of the other Participant's Programme.

- 3.2. Each Participant will take into account the approval status of AEOs of the other Participant's Programme in offering them, to the extent practicable, the following benefits:
 - (a) expedited clearance through reduced documentary and cargo inspections;
 - (b) grant priority checks for cargoes that have been selected for physical inspection; and
 - (c) in the event of a disruption to international trade, endeavour to

provide expedited clearance to the cargoes.

- 3.3. Either Participant may, under reasonable circumstances, suspend any or all of the benefits given to AEOs of the other Participant provided that the other Participant has been notified of the decision and the underlying reasons, as appropriate.

Article 4

Information Exchange and Communication

- 4.1. The Participants will set up an information exchange mechanism to effectively implement the following measures:

- (a) exchanging updated information including the name, address, identification code and approval status of the AEOs accredited under their respective Programmes through an agreed communication channel;
- (b) contact point for customs cooperation, in order to facilitate the rapid and secure exchange of information and improve coordination on importation issues;
- (c) update each other on any developments in, or revisions of their respective Programmes; and
- (d) exchange mutually beneficial information regarding supply chain security.

- 4.2 The Participants will:

- (a) each appoint a liaison officer and inform the other Participant of the appointment;
- (b) each abide by the other Participants' respective laws, regulations and policies related to the exchange of information; and
- (c) endeavour to ensure that the information exchanged under this Arrangement will be kept confidential and will be used by the

Participants and other respective government agencies solely for the purpose of implementing this Arrangement. If either Participant needs to use the information for the purposes outside this Arrangement, the requesting Participant will seek prior written consent from the Participant disclosing the information.

**Article 5
Future Endeavours**

The Participants will:

- (a) actively implement this Arrangement with a view to strengthening supply chain security and enhancing the Participants' common interest in trade facilitation;
- (b) each strive to provide AEOs of the other Participant's Programme with further benefits in accordance with this Arrangement;
- (c) actively pursue regular communication under this Arrangement with a view to eliminating obstacles to trade resulting from any emergency situations and ensuring business continuity; and
- (d) promote to non-AEOs engaging in supply chain activities the benefits of this Arrangement with a view to encouraging them to obtain certification under the respective Programmes.

**Article 6
Consultation, Review and Modification**

- 6.1. The Participants will endeavour to settle all issues related to the implementation of this Arrangement by consultations with each other.
- 6.2. The Participants will review this Arrangement as necessary.

- 6.3. The Participants may only modify this Arrangement by the written consent of both Participants, and any modification to this Arrangement will take effect on and from the date mutually determined by the Participants.

Article 7
Status of Arrangement

- 7.1 This Arrangement does not intend to create any rights or obligations binding under international law or the law of any jurisdiction, nor does it confer or create any rights, privileges or benefits on any third person, company or entity, private or public.
- 7.2 The Participants will implement the measures under this Arrangement in accordance with their respective applicable laws, regulations, policies, and practices as well as applicable international agreements to which the respective governments are a party.
- 7.3 No provision in this Arrangement will restrict either Participant from acting in accordance with the provisions of the applicable international agreements, or its respective laws, regulations, and practices.

Article 8
Commencement and Discontinuation

- 8.1. This Arrangement will come into effect upon signature by the Participants.
- 8.2. Either Participant may discontinue any activities under this Arrangement by providing the other Participant with a written notification of at least thirty (30) days in advance of the intended date of discontinuation.

SIGNED in duplicate in Jakarta on August 8th, 2022, and in Hong Kong on 31 August 2022, in two originals in the English and Bahasa Indonesia, all texts being equally valid. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.

For the Directorate General of
Customs and Excise of
the Ministry of Finance of the
Republic of Indonesia

For the Customs and Excise
Department of the Hong Kong
Special Administrative Region of the
People's Republic of China



Askolani
Director General

Louise HO Pul-shan
Commissioner

B. *NOTES OF MEETING* ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN *THE CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT OF THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.*

**1st Technical Meeting for AEO MRA Implementation
between
Customs & Excise Department (C&ED) and the
Directorate General of Customs and Excise (DGCE)
*Notes of Meeting***

Date	: 21 March 2023 (virtual meeting)	
Time	: 1430 hrs/ 1530 hrs (ID time/ HK Time)	
Present	: <u>C&ED</u>	
	Mr. Sam Chang	Assistant Superintendent
	Ms. Li Wong	Senior Inspector
	<u>DGCE</u>	
	Mr. Alfian Chaniago	Deputy Director of Bilateral and Regional Affairs, Directorate of International Affairs
	Mr. Yasser Ferdinansyah Gautama	Head of Bilateral Affairs I Section, Subdirectorates of Bilateral and Regional Affairs, Directorate of International Affairs
	Mr. Diding Saefudin	Head of Priority Program Development Section, Subdirectorates of Priority Program and AEO, Directorate of Customs
	Mr. Andrias Tulus Cahyono	Head of Intelligence Operations Support Section, Subdirectorates of Intelligence, Directorate of Enforcement and Investigation
	Mr. Yuafanda Kholfi Hartono	IT Specialist of Data Analysis and Services Section, Subdirectorates of Data Management and Services, Directorate of Customs and Excise Information
	<u>Consulate General of Indonesia in Hong Kong</u>	
	Mr. Buhari Sirait	Consul of Customs

Item **Contents**

1. Opening

Mr. Sam Chang and Mr. Alfian Chanlago delivered the opening remarks and welcomed all participants to the meeting.

Officers from C&ED and DGCE will further elaborate on the operation of their AEO Programmes in the meeting. The presentation's outline of C&ED can be found in *Annex I* and for DGCE in *Annex II*.

2. Import Clearance Procedure

Both sides gave an overview presentation of respective Risk Assessment and Clearance Procedures. C&ED and DGCE presented the flow of handling the incoming cargo, the risk management mechanism applied for cargo selection and examination as well as mechanism to handle AEO cargo respectively.

3. AEO Identification System

Both sides introduced briefly the mechanism of respective systems to recognize the AEO cargo.

The updates from C&ED:-

- ID exporter (IDAE0 company) should accurately provide their **Company name and Address** to carriers for submitting such information to C&ED for customs clearance.
- As of today, there are 79 HKAE0s in total.

The updates from DGCE:-

- The HKAE0 Company should notify its identification code and authorization date to its Indonesian importer when exporting to Indonesia. The Indonesian importer should accurately state that information together with code "451" while performing import declaration.
- DGCE compares such identification code with the information provided, which has been recorded in Customs & Excise Information System and Automation (CEISA), and, thereafter, if the two are matched, the DGCE provides the MRA AEO benefits.
- As of today, there are around 149 IDAE0s in total.

4. **AEO Benefits Scheme**

Respective AEO MRA benefits were discussed. Both sides agreed the following benefits would be provided to the AEOs of both sides (as stated in MRA Text):-

- Expedited clearance through reduced documentary and cargo inspections;
- Priority checks for cargo that have been selected for physical inspection; and
- In the event of a disruption to international trade, endeavor to provide expedited clearance to the cargoes.

After discussion, both sides agreed that the benefits would be granted to AEOs consignment only if the "Port of origin" is from either Hong Kong or Indonesia

5. **Pilot Operation Mechanism**

Regarding the mechanism for pilot operation, both sides agreed on the following:-

- Select 5 AEO exporter companies that have frequent export cargoes to other sides to conduct the pilot run;
- 2 months pilot operation to test if the AEOs could be identified by respective systems;
- Conduct the review for 1 month after the pilot run;
- If the review is satisfactory, both sides prepare for the full implementation respectively, e.g.IT system preparation, inform AEOs and set the date for full implementation, etc.

6. **Information Exchange Mechanism**

Both sides presented respective AEO data requirements. The details of information exchange, including the data elements required and frequency of exchange were discussed:-

- The list of AEO will be exchanged no later than the first 5 working days of each month;
- The list will be exchanged by an encrypted EXCEL file including the following data fields:

1. Identification code (AEO code)

2. name and address of AEO
 3. authorized date (accreditation date)
 4. status
 5. entity of AEO
 6. remarks
 7. validity period (feasibility of adding this field and its required format pending further discussion between C&ED and DGCE)
- The password should be 10 digits or more, containing capital and small letters and numbers. Both sides could send the password to the respective designated electronic mailbox upon receipt of acknowledgment.
 - Ms. LI WONG and Mr. Yasser Ferdinansyah Gautama will be the single liaison officer of C&ED and DGCE respectively.

C&ED also presented the latest development on the automation of AEO data exchange between C&ED and China Customs via an IT platform called APEX. Automation has replaced the traditional mean of exchanging data by email which enable the transmission of AEO data between two places more efficient, secure, and timely. DGCE noted the development and revealed that the automation of AEO data will be the next step for HK-ID AEO MRA. C&ED will send more information about APEX for DGCE for their feasibility study.

7. Operational Procedure Document

Both sides stated that a note should be published once the HK-ID AEO MRA is fully implemented. C&ED will issue a Notice to Trader to inform the traders how to enjoy the benefits under HK-ID AEO MRA.

DGCE will issue a Director General Decree that becomes the legal basis for the full implementation of the MRA. Further, dissemination will also be conducted regarding the mechanism and implementation of MRA, internally to the customs officers and externally to the exporter and/or importer (AEO and non-AEO).

Both sides agreed to provide all necessary information to each other to compile relevant notes.

8. Timeline

Both sides agreed to conduct the pilot run in May 2023 with a view to being fully implemented in August 2023.

9. Contact Point

The contact points of C&ED:-

1. Mr. Sam Chang
2. Ms. Li Wong

The contact point of DGCE:-

1. Mr. Yasser Ferdinansyah Gautama
2. Mr. Diding Saefudin

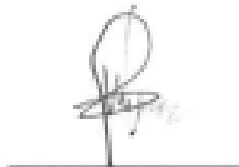
10 Closing

In closing, Mr. Sam Chang and Mr. Alfian Chaniago stated that the meeting was fruitful and looking forward to the successful implementation HK-ID AEO MRA.

Signed virtually on 21 March 2023.



Mr. Sam Chang
Assistant Superintendent
Office of Trade Relations and Public
Communication
C&ED



Mr. Alfian Chaniago
Deputy Director of Bilateral and Regional
Affairs
Directorate of International Affairs
DGCE

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI KEP-21/BC/2024
TENTANG
PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*)
KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK
OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*MUTUAL
RECOGNITION ARRANGEMENT AUTHORIZED
ECONOMIC OPERATOR*) ANTARA DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN *THE
CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT OF THE
GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL
ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA*

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN *THE CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT OF THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA* (HK C&ED)

1. Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai
 - a. Menerima informasi antara lain seperti daftar perusahaan AEO Hong Kong dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, *update* program AEO, dan informasi terkait lainnya dari pihak HK C&ED, selanjutnya:
 - 1) Menyampaikan daftar perusahaan AEO HK C&ED dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, dan status lainnya kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktur Penindakan dan Penyidikan, dan Direktur Teknis Kepabeanan dengan cara:
 - a) manual, dalam hal sistem komputer pelayanan belum mengakomodasi form daftar perusahaan AEO Hong Kong dan perubahannya atau mengalami gangguan; atau
 - b) memutakhirkan daftar perusahaan AEO Hong Kong dan perubahannya pada sistem komputer pelayanan, dalam hal sistem komputer pelayanan telah mengakomodasi form daftar perusahaan AEO Hong Kong dan perubahannya; dan/atau
 - 2) Menyampaikan informasi berupa *update* program AEO dan informasi terkait lainnya dari pihak HK C&ED kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan dan Direktur Teknis Kepabeanan;
 - b. Menerima informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi atau informasi lainnya seperti daftar perusahaan AEO Indonesia dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, *update* program AEO, dan informasi terkait lainnya dari Direktur Teknis Kepabeanan, selanjutnya menyampaikan kepada pihak HK C&ED;
 - c. Menyiapkan mekanisme komunikasi antara DJBC dengan pihak HK C&ED;

- d. Memberikan bimbingan teknis; dan/atau
 - e. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
2. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
- a. Dalam hal sistem komputer pelayanan belum mengakomodasi form daftar perusahaan AEO Hong Kong dan perubahannya atau mengalami gangguan, menerima informasi Perusahaan AEO Hong Kong dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, dan status lainnya dari Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, selanjutnya melakukan pemutakhiran data pada sistem komputer pelayanan;
 - b. Memutakhirkan Sistem Analisis Risiko Importasi dalam rangka pemberian fasilitas perdagangan pada Sistem Komputer Pelayanan;
 - c. Menyiapkan dan memastikan fasilitas perdagangan dapat diterapkan pada sistem komputer pelayanan;
 - d. Menyediakan informasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan;
 - e. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan; dan/atau
 - f. Memberikan bimbingan teknis.
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan
- a. Menerima informasi perusahaan AEO Hong Kong dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, dan informasi terkait lainnya dari Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, untuk selanjutnya dilakukan analisis; dan/atau
 - b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
4. Direktur Teknis Kepabeanan
- a. Menerima informasi antara lain seperti daftar perusahaan AEO Hong Kong dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, *update* program AEO, dan informasi terkait lainnya dari Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, untuk selanjutnya dilakukan analisis;
 - b. Menerima masukan dan melakukan evaluasi dalam rangka pelaksanaan penerapan secara penuh Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator*) dengan pihak HK C&ED;
 - c. Menyampaikan hasil evaluasi dan/atau informasi lainnya seperti daftar perusahaan AEO Indonesia dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, *update* program AEO, dan informasi terkait lainnya kepada Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai; dan/atau
 - d. Memberikan bimbingan teknis;

5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - a. Memberikan bimbingan teknis; dan/atau
 - b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
 6. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
 - a. Memberikan pelayanan teknis, konsultasi dan layanan informasi; dan/atau
 - b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
 7. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
 - a. Memberikan pelayanan teknis, konsultasi, dan layanan informasi; dan/atau
 - b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
-

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

